



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 3928-3939

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat

Radja Pebriadi Zuri¹, Cut Fitrika Syawalina², Maya Agustina³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh

radja.febriadi98@gmail.com, cut.fitrika@unmuha.ac.id, maya.agustina@unmuha.ac.id

Abstrak

Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menjadi instrumen utama dalam mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan serta mengelola belanja secara efisien dan efektif sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Laporan Realisasi Anggaran dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat selama periode 2022–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Teknik analisis data dilakukan melalui perhitungan rasio efisiensi dan rasio efektivitas untuk mengukur tingkat kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efisiensi belanja daerah sebesar 99,27% yang tergolong dalam kategori kurang efisien, karena realisasi belanja hampir sama dengan total anggaran yang tersedia. Sementara itu, rasio efektivitas pendapatan daerah menunjukkan rata-rata sebesar 105,45%, yang termasuk dalam kategori sangat efektif, karena realisasi pendapatan mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan yang baik dalam mengoptimalkan penerimaan daerah, namun masih perlu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan belanja. Secara keseluruhan, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat baik, namun efisiensi belanja masih perlu ditingkatkan guna mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih optimal, efisien, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Kata kunci: Laporan Realisasi Anggaran, Kinerja Keuangan, Pemerintah Daerah

1. Latar Belakang

Anggaran merupakan bagian penting dalam sistem manajemen keuangan baik di sektor publik maupun swasta. Dalam konteks organisasi, anggaran berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja finansial (Sariono & Marison, 2024). Anggaran tidak hanya menjadi rencana pendapatan dan belanja, tetapi juga instrumen akuntabilitas guna memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan efektif. Evaluasi atas pelaksanaan anggaran dilakukan melalui penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang menggambarkan sejauh mana penggunaan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2018).

Di sektor pemerintahan, anggaran adalah alat yang vital untuk mencapai tujuan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran melalui analisis laporan realisasi anggaran. Laporan tersebut mencatat sejauh mana anggaran yang telah dialokasikan telah terealisasi dalam bentuk pengeluaran, serta apakah anggaran yang telah disiapkan digunakan secara efisien dan efektif. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah alokasi dana telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dan apakah anggaran tersebut dapat mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Bastian, 2017).

Dalam praktiknya, realisasi anggaran sering kali mengalami deviasi, baik yang disebabkan oleh faktor internal (seperti perencanaan yang tidak akurat atau keterlambatan dalam pelaksanaan proyek) maupun faktor eksternal (misalnya perubahan kebijakan pemerintah) (Alhabsi, et al, 2023). Ketidaksesuaian antara rencana anggaran dan realisasi berpotensi menunjukkan ketidakefisienan, lemahnya perencanaan, atau bahkan potensi penyalahgunaan anggaran.

Dalam konteks pemerintahan, kinerja keuangan mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara efektif, efisien, ekonomis, dan akuntabel. Kinerja keuangan merupakan bagian dari kinerja

organisasi, yaitu tingkat pencapaian hasil atau output dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan (Mahsun, 2016).

Untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah, digunakan berbagai metode analisis seperti analisis rasio, analisis varians, dan analisis pertumbuhan. Analisis rasio menjadi teknik yang paling sering digunakan karena mampu menunjukkan hubungan proporsional antara anggaran dan realisasinya serta memberikan gambaran efektivitas pendapatan, efisiensi belanja, dan pertumbuhan anggaran dari tahun ke tahun (Harahap, 2020). Penilaian ini penting untuk mengukur apakah kinerja anggaran pemerintah daerah sudah optimal sesuai prinsip good governance.

Di Indonesia, anggaran pemerintah terdiri dari dua jenis, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk tingkat pusat, serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk tingkat daerah. Anggaran ini disusun berdasarkan prioritas pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, memajukan perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan umum. Realisasi anggaran yang baik menunjukkan bahwa alokasi anggaran telah digunakan secara efisien dan tepat sasaran untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sebaliknya, ketidaksesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi dapat menjadi indikator ketidakefisienan dalam penggunaan dana, atau bahkan penyalahgunaan anggaran (Ginting, et al, 2024). Oleh karena itu, pelaksanaan anggaran yang akuntabel perlu dievaluasi melalui laporan keuangan, salah satunya yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Laporan keuangan sektor publik merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan selama satu periode, termasuk untuk tujuan pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja (Sujarweni, 2015). Pemerintah daerah wajib menyusun komponen laporan keuangan sesuai ketentuan, yakni Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (Ratmono, 2017). LRA menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya (Haigustina, 2023). Laporan ini menjadi dasar evaluasi akuntabilitas fiskal pemerintah daerah.

Pelaksanaan LRA memiliki landasan hukum yang kuat yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan, termasuk realisasi APBN/APBD, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mewajibkan pemerintah menyampaikan laporan keuangan yang berisi salah satunya Laporan Realisasi Anggaran, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dengan dasar hukum tersebut, penyusunan LRA oleh pemerintah daerah menjadi kewajiban formal sekaligus instrumen utama dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Selain memahami dasar hukum, evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran membutuhkan metode analisis yang tepat. Berbagai teknik digunakan dalam menilai kinerja keuangan seperti analisis varians, analisis pertumbuhan, dan analisis rasio. Analisis rasio merupakan salah satu teknik yang penting karena memberikan gambaran perbandingan antara anggaran dan realisasi untuk melihat kecenderungan efisiensi dan efektivitas dari tahun ke tahun (Harahap, 2020).

Pada tingkat daerah, pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain yang sah (Ismail, 2024). Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk perencanaan pendapatan, belanja, dan penyusunan LRA.

Pengelolaan keuangan daerah di berbagai wilayah Indonesia masih menghadapi kendala berupa ketidaktepatan realisasi anggaran, rendahnya serapan anggaran, serta munculnya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait ketidaksesuaian belanja, kesalahan pencatatan, atau kekurangan volume pekerjaan. Fenomena tersebut menunjukkan perlunya peningkatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran agar lebih akuntabel dan efektif. Kondisi serupa juga terlihat pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

Pada tahun anggaran 2023, pemerintah kabupaten Aceh Barat berhasil merealisasikan pendapatan daerah sebesar Rp 1,351 triliun, dengan realisasi belanja daerah mencapai Rp 1,356 triliun dan pembiayaan netto sebesar Rp 107,7 miliar. Meskipun terdapat pencapaian positif dalam realisasi pendapatan dan belanja, namun terdapat temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan, seperti pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan serta kekurangan volume dalam beberapa paket pekerjaan belanja modal (Iskandar, 2024). Disamping itu, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa rendahnya serapan anggaran di daerah ini dipicu oleh lemahnya perencanaan APBD dan ketidakefisienan pelaksanaan kegiatan, sehingga berpotensi meningkatkan SILPA (Afriansyah, 2023).

Berikut realisasi anggaran tahun 2022-2024 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Tabel 1 Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat (2022-2024)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
2022	1.272.590.146.832,34	1.329.776.515.505,65	104,49
2023	1.361.137.805.877,00	1.351.975.407.387,50	99,33%
2024	1.437.406.036.168,00	1.611.087.820.605,88	112,08%

Sumber : Data Sekunder, 2022, 2023 dan 2024

Realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat periode 2022-2024 menunjukkan fluktuasi. Tahun 2022 realisasi mencapai 104,49% dari target, menurun pada 2023 menjadi 99,33%, dan kembali meningkat pada 2024 sebesar 112,08%. Fluktuasi yang signifikan tersebut menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam perencanaan dan eksekusi anggaran, sehingga memerlukan analisis lebih lanjut untuk menilai kinerja keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk mengetahui dan memahami tentang analisis laporan realisasi anggaran dalam menilai kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, guna memberikan pemahaman lebih dalam mengenai pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

2. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan format deskriptif. Penelitian kuantitatif dengan jenis deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul dari masyarakat yang menjadi objek penelitian berdasarkan apa yang terjadi. Pendekatan kuantitatif deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui analisis laporan realisasi anggaran untuk menilai kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang disajikan dalam bentuk angka.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu kantor BPKD Kabupaten Aceh Barat, yang merupakan salah satu kantor pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten Aceh Barat yang berlokasi di jalan Gajah Mada Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Waktu penelitian yang dilakukan membutuhkan kurang lebih 2 (dua) bulan (disesuaikan dengan kebutuhan penelitian).

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik/angka.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung atau pihak pertama. Data ini dikumpulkan secara khusus bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sifat dari sumbernya merupakan hasil dari observasi atau pengamatan langsung dari kejadian, kegiatan, maupun hasil pengujian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi. Peneliti menggunakan data sekunder karena peneliti mengumpulkan informasi dari data yang telah diolah oleh pihak yang berwenang dalam bentuk dokumen seperti laporan realisasi anggaran, data lain yang diperlukan dalam penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Tinjauan pustaka (*library research*). Tinjauan pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari literatur-literatur yang ada berupa buku-buku, karya ilmiah, jurnal atau artikel-artikel terkait, serta mengakses *webiste* dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.
2. Penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan langsung di instansi pemerintahan, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat dengan melakukan wawancara (*interview*) dengan pihak yang berkompeten terhadap data yang diperlukan serta pengumpulan data yang dianggap relevan dengan masalah penelitian.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan dalam mendapatkan informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara objektif, menilai atau mengukur fenomena yang akan diamati. Instrumen yang akan digunakan dalam riset ini yaitu studi pustaka dan dokumentasi lapangan pada laporan keuangan BPKD Kabupaten Aceh Barat yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2022-2024.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode yang digunakan dalam mengelola hasil penelitian untuk memperoleh suatu kesimpulan.

1. Analisis Deskriptif

Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti.

2. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menggunakan realisasi anggaran, artinya data yang diperoleh di lapangan diolah dengan sedemikian rupa sehingga memberikan data yang sistematis, faktual dan akurat tentang permasalahan yang diteliti. Teknik analisis deskriptif yang digunakan untuk menganalisa data yaitu dengan cara:

a. Analisis Efisiensi Realisasi Anggaran

Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain output/unit input. Output merupakan realisasi biaya untuk mempeleh penerimaan daerah dalam hal ini adalah belanja dan input merupakan realisasi dari penerimaan daerah dalam hal ini adalah pendapatan. Untuk menganalisis tingkat efisiensi dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran pendapatan. Rumus Pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Ouput (Biaya Perolehan PAD)}}{\text{Input (Realisasi PAD)}} \times 100\%$$

Semakin kecil nilai rasio efisiensi mengindikasikan semakin besar efisiensi dari realisasi pendapatan suatu daerah terhadap biaya perolehan PAD yang mengindikasikan kinerja yang efisien. Rasio efisiensi dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2 Kriteria Penilaian Kinerja Efisiensi Belanja

Kriteria Efisiensi Belanja	Persentase
Sangat efisien	<60%
Efisien	60-80%
Cukup efisien	81-90%
Kurang efisien	91-100%
Tidak efisien	>100%

Sumber : Zainuddin (2019)

b. Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran

Efektivitas berfokus pada *outcome* atau hasil. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dilaksanakan bisa memenuhi target yang diharapkan. Efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga kegiatan dikatakan efektif jika memiliki pengaruh

terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Konsep efektivitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai tujuannya. Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Rasio efektivitas ulsebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Target Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Untuk menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan dapat dilihatdari perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja. Standar efektivitas ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3 Kriteria Penilaian Kinerja Efektivitas

Kriteria Efektivitas Belanja	Persentase
Sangat efektif	>100%
Efektif	90-100%
Cukup efektif	80-90%
Kurang efektif	60-80%
Tidak efektif	<60%

Sumber : Zainuddin (2019)

3. Hasil dan Diskusi

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang terletak di pesisir barat Pulau Sumatera dan memiliki peran strategis dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, serta kebudayaan di kawasan Barat Aceh (Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, 2024). Secara geografis, wilayah Kabupaten Aceh Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya di sebelah utara, Kabupaten Aceh Tengah dan Nagan Raya di sebelah timur, Kabupaten Nagan Raya di sebelah selatan, serta Samudra Hindia di sebelah barat, yang menunjukkan posisi wilayah ini sebagai daerah pesisir yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama di sektor kelautan dan perikanan (BPS Aceh Barat, 2024). Ibu kota kabupaten ini adalah Meulaboh yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat kegiatan ekonomi, dan pusat pelayanan publik, sehingga menjadi motor penggerak pembangunan daerah (Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, 2024). Pemerintah Kabupaten Aceh Barat merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati serta didukung oleh perangkat daerah seperti Sekretariat Daerah, dinas, badan daerah, kecamatan, dan gampong yang menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan kekhususan Aceh sesuai peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, 2024). Pemerintah daerah memiliki komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan potensi ekonomi daerah, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan publik, serta melestarikan nilai-nilai keislaman dan budaya Aceh sebagai bagian dari identitas daerah (Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, 2024). Kondisi sosial budaya masyarakat Aceh Barat juga masih sangat menjunjung tinggi nilai adat, syariat Islam, serta budaya gotong royong dan musyawarah, yang mencerminkan kuatnya nilai sosial dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat (BPS Aceh Barat, 2024).

Dalam mendukung tata kelola keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memiliki Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) yang merupakan perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). BPKD Kabupaten Aceh Barat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta berlokasi di Komplek Kantor Bupati Aceh Barat, yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan keuangan daerah (Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, 2024). Tugas pokok BPKD meliputi pengelolaan keuangan daerah, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBK, pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah, pengelolaan kas daerah dan aset daerah, serta pembinaan dan koordinasi pengelolaan keuangan perangkat daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, 2024). Selain itu, BPKD juga memiliki fungsi strategis dalam perumusan kebijakan teknis keuangan daerah, pelaksanaan anggaran, pengelolaan perbendaharaan, penyusunan laporan keuangan, serta pembinaan administrasi keuangan perangkat daerah guna mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan publik (Mardiasmo, 2018). Visi BPKD Kabupaten Aceh Barat adalah terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan profesional, dengan misi

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6754>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang tertib, meningkatkan kapasitas aparatur, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance (Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, 2024). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPKD memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris, berbagai bidang seperti Bidang Pendapatan, Bidang Perencanaan Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yang didukung oleh pejabat fungsional dan staf teknis (Peraturan Bupati Aceh Barat, 2023). Struktur organisasi ini dirancang untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik serta pembangunan daerah yang berkelanjutan (Mahmudi, 2019).

B. Hasil Penelitian

Pengukuran kinerja keuangan merupakan salah satu cara menunjukkan akuntabilitas yaitu bagaimana cara pemerintah daerah khususnya memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas atau kegiatan yang telah tersusun di anggaran. Upaya meningkatkan kinerja seharusnya diiringi dengan pengukuran kinerja yang baik. Dan pengukuran kinerja keuangan ini lebih fokus pada perhitungan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang ada dengan menggunakan beberapa perhitungan analisis rasio, dimana perhitungan rasio pada pemerintah tidaklah sama dengan perhitungan dengan perhitungan analisis rasio yang ada pada instansi perusahaan, adapun analisis rasio yang digunakan yaitu rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian belanja dan rasio varians belanja sesuai dengan analisis yang digunakan, maka data yang dibutuhkan yaitu berupa laporan keuangan BPKD Kabupaten Aceh Barat. Laporan keuangan yang peneliti gunakan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) selama tahun terakhir yaitu dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memberikan informasi yang bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama, karena anggaran merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintah.

1. Hasil Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat

Laporan Realisasi Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Barat tahun 2022-2024, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4 Realisasi Anggaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022-2024

Tahun	Pendapatan		Belanja	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2022	1.272.590.146.832,34	1.329.776.515.550,65	1.381.559.675.657,21	1.330.736.825.406,15
2023	1.361.137.805.877,00	1.351.975.407.387,50	1.456.397.024.846,37	1.355.619.103.188,43
2024	1.437.406.036.168,00	1.611.087.820.605,88	1.662.230.194.336,44	1.575.087.638.450,08

Sumber : Laporan BPKD Kabupaten Aceh Barat (Data diolah 2026)

Tabel 4 menjelaskan bahwa dalam setiap tahun penggunaan anggaran pada instansi khususnya Bappeda Kabupaten Aceh Barat mengalami fluktuasi dapat dikatakan pasang suruh atau tidak tetap. Selalu ada perubahan yang menarik ketika kita melakukan analisis. Dalam hal ini perubahan dan pertumbuhan dari pengguna anggaran merupakan salah satu aspek penting dalam penilaian kinerja keuangan yang ada pada instansi.

Peningkatan jumlah anggaran dan anggaran yang terealisasi terjadi pada tahun 2024 sebesar Rp 1.437.406.036.168,00 dan Rp 1.611.087.820.605,88. Dari tabel diatas dapat dilihat peningkatan dan penurunan realisasi anggaran setiap tahunnya. Sedangkan untuk belanja daerah terjadi peningkatan pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp 1.662.230.194.336,44 anggarannya, dan untuk relaisasi belanja daerah jumlah anggarannya sebesar Rp 1.575.087.638.450,08.

Jumlah anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp 1.272.590.146.832,34 dengan persentase realisasi sebesar 104,49%, dengan jumlah belanja daerah yang terealisasi sebesar Rp 1.330.736.825.406,15. Jumlah anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp 1.361.137.805.877,00 dengan persentase realisasi sebesar 99,33%, dengan jumlah belanja yang terealisasi sebesar Rp 1.355.619.103.188,43. Jumlah anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp 1.437.406.036.168,00 dengan persentase realisasi sebesar 112,08%, dengan jumlah belanja yang terealisasi sebesar Rp 1.575.087.638.450,08.

2. Hasil Pengukuran Rasio Efisiensi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022-2024

Rasio efisiensi digunakan untuk membandingkan antara realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran pendapatan dan juga untuk melihat tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah yang mana semakin besar rasio maka semakin tidak efisien dan sebaliknya semakin kecil rasio maka semakin efisien kinerja pada pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria efisiensi belanja adalah sebagai berikut:

- a. Sangat efisien : Kurang dari 60%
- b. Efisien : 60 - 80%
- c. Cukup efisien : 81 - 90%
- d. Kurang efisien : 91 - 100%
- e. Tidak efisien : lebih dari 100%

Rumus dan hasil perhitungan rasio efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Tahun 2022

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{1.330.736.825.406,15}{1.329.776.515.550,65} \times 100\% = 100,07\%$$

Tahun 2023

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{1.355.619.103.188,43}{1.351.975.407.387,50} \times 100\% = 100,27\%$$

Tahun 2024

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{1.575.087.638.450,08}{1.611.087.820.605,88} \times 100\% = 97,77\%$$

Perhitungan dengan menggunakan rumus analisis rasio efisiensi, maka diperoleh sebagai berikut:

Tabel 5 Rasio Efisiensi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022-2024

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Pendapatan	Rasio Efisiensi	Ket
2022	Rp 1.330.736.825.406,15	Rp 1.329.776.515.550,65	100,07%	Tidak Efisien
2023	Rp 1.355.619.103.188,43	Rp 1.351.975.407.387,50	100,27%	Tidak Efisien
2024	Rp 1.575.087.638.450,08	Rp. 1.611.087.820.605,88	97,77%	Kurang Efisien

Sumber : Data Hasil Olahan

Tabel 5 diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat efisiensi pemerintah Kabupaten Aceh Barat periode tahun 2022-2024, dapat dilihat pada tahun 2022 rasio efisiensi sebesar 100,07% yang termasuk dalam kriteria kurang efisien karena berada di antara 91 sampai dengan 100%. Hal ini disebabkan karena belanja pemerintah cukup tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara pendapatan daerah belum sepenuhnya stabil, mengindikasikan sedikit kekurangan efisiensi. Pada tahun 2023, rasio efisien mengalami peningkatan lagi sebesar 0,20% menjadi 100,27% yang termasuk dalam kriteria kurang tidak efisien karena berada pada rentang lebih dari 100%, yang menunjukkan belanja pemerintah masih cukup tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara pendapatan daerah belum sepenuhnya stabil yang mengindikasikan terjadinya kekurangan efisiensi.

Tahun 2024, rasio efisien mengalami penurunan sebesar 2,5% menjadi 97,77% yang termasuk dalam kriteria kurang efisien karena berada di antara 91% sampai dengan 100% yang disebabkan usaha pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sementara pendapatan masih belum sepenuhnya stabil yang mengindikasikan sedikit kekurangan efisiensi. Secara keseluruhan, efisiensi anggaran dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang dinamis dan kebijakan fiskal pemerintah yang beradaptasi dengan kebutuhan pemulihan ekonomi dan pembangunan jangka panjang.

Berdasarkan hasil uji rasio efisiensi rata-rata selama tiga tahun anggaran 2022-2024, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berada pada tingkat efisiensi yang dapat dikatakan kurang efisien sampai dengan tidak efisien. Ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berhasil mengelola anggaran dengan tingkat efisiensi yang cukup baik. Meskipun ada fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan beberapa tahun menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi atau lebih rendah, angka rata-rata rasio efisiensi anggaran menunjukkan upaya yang cukup stabil dalam mengelola perbandingan antara belanja dan pendapatan. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berhasil menjaga anggaran agar tetap efisien dalam skala yang wajar meskipun ada tantangan ekonomi dan peningkatan pengeluaran yang diperlukan. Namun, rasio tersebut juga menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal menjaga keseimbangan antara belanja dan pendapatan agar lebih efisien di masa mendatang.

$$\text{Total Rasio Efisiensi} = \frac{4.261.443.567.045}{4.292.839.743.544} \times 100\% = 99,27\%$$

3. Hasil Pengukuran Rasio Efektivitas Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022-2024

Pengukuran efektivitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2018). Apabila organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan secara efektif dan untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan cara melihat perbandingan antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan.

- a. Sangat efektif : lebih dari 100%
- b. Efektif : 90 - 10%
- c. Cukup efektif : 80 - 90%
- d. Kurang efektif : 60 - 80%
- e. Tidak efektif : dibawah 60%

Rumus dan hasil perhitungan rasio efektivitas dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Tahun 2022

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{1.329.776.515.550,65}{1.272.590.146.832,34} \times 100\% = 104,49\%$$

Tahun 2023

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{1.351.975.407.387,50}{1.361.137.805.877,00} \times 100\% = 99,33\%$$

Tahun 2024

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{1.611.087.820.605,88}{1.437.406.036.168,00} \times 100\% = 112,08\%$$

Perhitungan dengan menggunakan rumus analisis rasio efektivitas, maka diperoleh sebagai berikut:

Tabel 6 Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022-2024

Tahun	Anggaran	Realisasi	Rasio Efektivitas	Ket
2022	1.272.590.146.832,34	1.329.776.515.550,65	104,49%	Sangat Efektif
2023	1.361.137.805.877,00	1.351.975.407.387,50	99,33%	Efektif
2024	1.437.406.036.168,00	1.611.087.820.605,88	112,08%	Sangat Efektif

Sumber : Data Diolah, 2025

Tabel 6 diatas dapat dijelaskan bahwa selama periode tahun anggaran 2022-2024 tingkat efektivitas anggaran yang ada pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus mengalami fluktuasi, yang artinya terdapat beberapa kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan. Tahun 2022 tingkat efektivitas dari anggaran pendapatan daerah berada pada persentase 104,49% yang menunjukkan kinerja sangat efektif. Dengan tingkat efektivitas 104,49%, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mampu melaksanakan sebagian besar program dan kegiatan yang

direncanakan. Realisasi yang mendekati anggaran menunjukkan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang relatif baik.

Tahun 2023 mengalami penurunan efektivitas menjadi 99,33%. Meskipun masih dalam kategori cukup efektif, penurunan ini mengindikasikan adanya hambatan dalam pelaksanaan anggaran, baik dari sisi administrasi, teknis pengadaan, atau penyesuaian prioritas kegiatan. Penurunan efektivitas ini perlu menjadi perhatian yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti fluktuasi ekonomi global, penurunan aktivitas sektor-sektor pendapatan utama, atau kebijakan fiskal yang kurang optimal pada tahun tersebut, sehingga anggaran tidak tercapai sesuai harapan. Penurunan ini mengindikasikan adanya kendala dalam pelaksanaan anggaran, baik dari aspek administratif, teknis, maupun faktor eksternal seperti dinamika ekonomi dan kebijakan fiskal, sehingga realisasi pendapatan tidak sepenuhnya mencapai target.

Tahun 2024 menunjukkan perbaikan efektivitas menjadi 112,08% dari tahun 2023 dan 2022. Kinerja ini kembali mendekati kategori sangat efektif, bahkan melebihi capaian pada tahun 2022. Peningkatan ini menandakan perbaikan dalam perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan anggaran setelah penurunan yang terjadi pada 2023. Pemerintah daerah mampu meningkatkan serapan anggaran dan memperbaiki efektivitas pengelolaan program. Dengan demikian, perubahan setiap tahun ini menunjukkan dinamika ekonomi yang selalu berubah dan pengaruh kebijakan yang ditetapkan.

Meskipun begitu, dari tahun 2022-2024 tingkat efektivitas dilihat bahwa meskipun terdapat tantangan dalam beberapa tahun, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berhasil menjalankan anggaran dengan cukup baik dalam periode tersebut. Hal ini juga mencerminkan adanya upaya yang harus terus dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan dan mengelola anggaran dengan lebih optimal, meskipun menghadapi dinamika ekonomi yang berubah-ubah.

$$\text{Total Rasio Efektivitas} = \frac{4.292.839.743.544}{4.071.133.988.877} \times 100\% = 105,45\%$$

4. Analisis Hasil Penelitian

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berisi perincian tentang anggaran entitas pelaporan serta realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan. Pengguna laporan dapat menggunakan data ini untuk menilai keputusan yang dibuat tentang distribusi pendanaan, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan terkait dengan total realisasi anggaran, yang membantu dalam menilai kinerja pemerintah dalam efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Ringkasan hasil penelitian mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Ringkasan Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat

No.	Analisis Kinerja Keuangan	Hasil Penelitian	Keterangan
1.	Rasio Efisiensi Belanja	99,27%	Kurang Efisien
2.	Rasio Efektivitas Belanja	105,45%	Sangat Efektif

Sumber : Data Hasil Olahan

C. Pembahasan

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Ditinjau dari Rasio Efisiensi

Penilaian analisis efisiensi dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sudah melakukan penggunaan anggaran yang kurang efisien sampai dengan tidak efisien. Hal ini dibuktikan dengan persentase selama tiga tahun yang melebihi anggaran pendapatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan realisasi anggaran belanja yang lebih besar dari pendapatan daerah. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kurang efisien dalam realisasi anggaran belanja daerah.

Nilai efisiensi sebesar 97,77% pada tahun 2024 menandakan bahwa realisasi belanja hampir menyamai pendapatan. Artinya meskipun tidak jauh melampaui pendapatan, belanja daerah relatif tinggi dibandingkan kemampuan pendapatan, yang menunjukkan potensi pemborosan atau penggunaan anggaran tanpa optimalisasi. Namun, pada tahun 2022 dan 2023 dengan rasio efisiensi diatas 100% menunjukkan belanja daerah lebih tinggi dibandingkan pendapatan daerah yang menandakan penggunaan anggaran tanpa optimalisasi.

Ketidakefisienan belanja dapat menjadi beban pada fiskal daerah, terutama jika realisasi belanja lebih besar dari pendapatan. Kondisi ini bisa menyebabkan defisit APBD atau tekanan likuiditas jika tidak diimbangi oleh

penerimaan lain atau pinjaman. Selain itu, efisiensi pengeluaran sangat penting agar belanja publik benar-benar produktif, memberikan nilai (*value for money*), dan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi lokal.

Penelitian terdahulu oleh Faisol (2018) pada kota Jawa Tengah dan Jawa Timur menunjukkan bahwa efisiensi pengeluaran publik berhubungan positif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa efisiensi belanja bukan hanya masalah penghematan, tetapi juga tentang mendorong hasil pembangunan yang bermanfaat bagi ekonomi lokal. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat efisiensinya rendah (kurang efisien) maka potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari belanja publik mungkin tidak maksimal. Belanja yang terlalu tinggi tanpa kontrol efisiensi bisa menghasilkan pemborosan yang sejatinya dapat digunakan untuk program lain atau dialihkan ke sektor produktif.

Berdasarkan penelitian terdahulu, beberapa faktor yang sering dikaitkan dengan efisiensi belanja pemerintah daerah adalah akuntabilitas, *good governance* (tata kelola yang baik), efisiensi sektor spesifik, distribusi dan alokasi belanja. Penelitian oleh Rahayu dan Khoirunurrofik (2018), menemukan bahwa akuntabilitas memiliki hubungan *non-linear* dengan efisiensi pengeluaran daerah. Pada titik tertentu, peningkatan akuntabilitas tidak selalu menaikkan efisiensi. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mungkin memiliki struktur pengawasan atau akuntabilitas yang belum optimal, atau terdapat inefisiensi dalam manajemen internal, meskipun laporan pengawasan mungkin bagus.

Selain itu, penelitian oleh Wardhani, Rossieta & Martani (2017), menunjukkan bahwa meskipun belanja publik bisa besar, jika tata kelolanya buruk, maka hasil pembangunan tidak optimal dan belanja bisa boros tanpa hasil maksimal. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, hal ini berarti perlu perbaikan manajemen anggaran, transparansi, dan pertanggungjawaban agar setiap rupiah belanja memberikan *outcome* yang nyata.

Penelitian lainnya oleh Mukti & Auwalin (2020) dalam *Efficiency Analysis of Regional Government Expenditure on Development* menggunakan pendekatan DEA dan Malmquist Index untuk mengukur efisiensi pembangunan daerah. Jika alokasi anggaran pemerintah Kabupaten Aceh Barat terlalu banyak diarahkan pada belanja rutin (gaji, administrasi) dan kurang pada belanja produktif (seperti infrastruktur, layanan publik), maka efisiensi akan rendah.

Dalam meningkatkan efisiensi, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dapat melakukan audit internal, memperbaiki akuntabilitas, mengalokasikan lebih banyak ke belanja produktif, dan melakukan pemantauan berkala. Sehingga, belanja daerah tidak hanya ditekan (penghematan), tetapi diarahkan agar menghasilkan manfaat maksimal (*value for money*) dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

2. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Ditinjau dari Rasio Efektivitas

Hasil perhitungan analisis efektivitas pendapatan daerah, maka dapat dilihat mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sudah melakukan penggunaan anggaran dengan efektif. Dapat dilihat dari rasio perhitungannya sebesar 99,33% sampai dengan 112,08%, maka penggunaan anggaran pendapatan selama tiga tahun anggaran tersebut termasuk kategori efektif sampai dengan sangat efektif, hal ini dapat diartikan manajemen penyusunan anggaran di Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sudah mencapai tujuan dan target realisasinya dimana semakin besar kontribusi pengeluaran yang dilakukan terhadap nilai pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan dapat dikatakan efektif proses kerja dari unit kerja yang dimaksud. Batas atas anggaran yang tersedia, dapat pula mencapai tujuan dari sasaran seperti yang direncanakan, dimana tingkat rasio tertinggi pada tahun 2024 sebesar 112,08% dan rasio terendah pada tahun 2023 sebesar 99,33%.

Pengukuran efektivitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2018). Apabila telah mencapai tujuan, maka telah berjalan secara efektif dan untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan cara melihat perbandingan antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan. Berdasarkan rasio efektifitas pemerintah Kabupaten Aceh Barat pada periode 2022-2024 menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengoptimalkan target pendapatan dalam jangka menengah, secara umum kinerja pendapatan daerah menunjukkan tren positif, dan kemampuan adaptasi fiskal pemerintah daerah cukup baik.

Penelitian terdahulu yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek meningkatkan jumlah anggaran PAD untuk tahun 2022. Dan jumlah realisasi PAD tahun 2022 melebihi jumlah capaian yang ditetapkan. Sehingga diperoleh angka 102,33 untuk rasio efektivitas PAD pada tahun 2022. Angka ini masuk ke kategori sangat efektif. Secara keseluruhan, rasio efektivitas selama tahun 2020-2022 mengalami naik turun namun masih berada di atas 90%. Berdasarkan angka pada rasio ini dikategorikan ke kelompok cukup dengan rentang nilai 90-99%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan sudah mendekati efektif (Arini & Zulvianira, 2024).

Secara keseluruhan, rata-rata efektifitas 105,45% menempatkan Kabupaten Aceh Barat dalam kinerja sangat efektif dalam pengelolaan pendapatan daerah. Hasil ini konsisten dengan literatur yang menyebutkan bahwa

efektifitas pendapatan dapat berfluktuasi mengikuti dinamika ekonomi dan kualitas perencanaan anggaran (Mardiasmo, 2018). Pemerintah Kabupaten Aceh Barat perlu menjaga stabilitas kinerja pendapatan dengan memperkuat strategi fiskal, meningkatkan pengawasan, dan melakukan penyesuaian terhadap kondisi ekonomi yang berubah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022-2024, maka peneliti dapat menarik simpulan sebagai berikut: 1.) Menurut hasil perhitungan rasio efisiensi realisasi anggaran pemerintah Kabupaten Aceh Barat tahun 2022-2024 menunjukkan kinerja efisiensi berada pada kategori kurang efisien hingga tidak efisien. Tahun 2022, rasio efisiensi sebesar 100,07% menunjukkan bahwa realisasi belanja sedikit lebih besar dibandingkan realisasi pendapatan, sehingga termasuk dalam kategori tidak efisien. Tahun 2023, rasio efisiensi meningkat menjadi 100,27%, yang menandakan tingkat ketidakefisienan yang semakin tinggi. Pada tahun 2024, rasio efisiensi mengalami penurunan menjadi 97,77%, yang termasuk dalam kategori kurang efisien. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengendalian belanja dan upaya peningkatan pendapatan, meskipun secara keseluruhan pengelolaan anggaran belum sepenuhnya mencapai tingkat efisiensi yang optimal. Secara keseluruhan, fluktuasi rasio efisiensi selama periode 2022–2024 dipengaruhi oleh dinamika kondisi ekonomi daerah dan kebijakan fiskal pemerintah yang berfokus pada pemulihan ekonomi serta pembangunan jangka panjang. 2.) Rasio keuangan pemerintah Kabupaten Aceh Barat berdasarkan rasio efektivitas dari tahun 2022-2024 menunjukkan kinerja efektivitas anggaran mengalami fluktuasi yang berada pada kategori cukup efektif hingga sangat efektif. Pada tahun 2022, tingkat efektivitas sebesar 104,49% menunjukkan kinerja sangat efektif, yang menandakan bahwa realisasi pendapatan daerah mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Tahun 2023, efektivitas menurun menjadi 99,33%, yang masih tergolong cukup efektif. Tahun 2024, tingkat efektivitas kembali meningkat signifikan menjadi 112,08%, yang termasuk dalam kategori sangat efektif. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan anggaran, serta keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan serapan dan optimalisasi sumber pendapatan.

Referensi

1. Afriansyah, R.D. 2023. *Kajian SiLPA APBD Pemerintah Daerah di Aceh: Benarkah Akibat Terhambatnya Penyerapan APBD?*. Djpb Kemenkeu. https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/data/847-berita/opini/4054-kajian-silpa-apbd-pemerintah-daerah-di-aceh-benarkah-akibat-terhambatnya-penyerapan-apbd.html?utm_source=chatgpt.com
2. Alhabsi, R.H., Nuwun P., & Risma. 2023. *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2021*. Jurnal Riset Akuntansi.
3. Bastian. 2017. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar* Jakarta : Penerbit Erlangga
4. Cahyono, D., & Yustrianthe, R. H. 2019. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Belanja Daerah*. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik.
5. Darmawan, D. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
6. Dien, et al. 2015. *Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung*. Jurnal EMBA Vol.3 No.1 Maret 2015.
7. Fahmi. 2018. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Bandung : Alfabeta.
8. Ginting, E., Shellya, E.P, et al. 2024. *Analisis Keterkaitan Pemerintah Pusat dalam Peningkatan APBD dan APBD Tahun Anggaran 2023*. Hakim : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol. 2, No.1.
9. Haigustina. 2023. *Analisis Laporan Realisasi Anggaran dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna*. Skripsi. STIE Pembangunan Tanjung Pinang.
10. Halim, A. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
11. Halim, A., & Kusufi, M. S. 2020. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
12. Harahap. 2020. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah*. *Ekonomis : Journal of Economics and Business*, Vol. 4 Nomor 1. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>
13. Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : IAI.
14. Iskandar, T.D. 2024. *Aceh Barat realisasikan pendapatan daerah Rp1,35 T di 2023*. Antara Aceh. https://aceh.antaranews.com/berita/362076/aceh-barat-realisasikan-pendapatan-daerah-rp135-t-di-2023?utm_
15. Ismail. 2024. *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majene*. Skripsi. IAIN Pare Pare.
16. Karina. 2019. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta*. AkunNas, Vol. 13, No.1.
17. Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. 2018. *Intermediate Accounting*. Wiley.
18. Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga Cetakan Pertama. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
19. Mahsun, M. 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
20. Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Publisher.
21. Mardiasmo. 2018. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
22. Milla. 2021. *Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Kantor Kecamatan Kramat*. Tugas Akhir Politeknik Harapan Bersama.
23. Munawir, S. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
24. Nordiawan, D. 2017. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
25. Nurfadillah, A.I. 2018. *Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

26. PMDN No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
27. PP Nomor 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
28. Prasetya. 2019. *Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : Andi.
29. Putra, A.F., & Novia D. 2020. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja (Studi Empiris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman)*. Jurnal Akuntansi Indonesia.
30. Rahmah, Miftahul. 2024. *Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan Kantor Camat Liukang Kalmas Kab. Pangkep*. (Skripsi). Prodi Manajemen, FEB Universitas Muhammadiyah Makassar.
31. Rahmawati, N. 2020. *Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis.
32. Ramli. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bogor : Ghalis Indonesia.
33. Ratmono. 2017. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Edisi Kedua, Cetakan Pertama. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
34. Riadi, Muchlisin. 2021. *Pengertian, Fungsi, Jenis dan Metode Penyusunan Anggaran*. https://www.kajianpustaka.com/2019/11/pengertian-fungsi-jenis-dan-metode-penyusunan-anggaran.html?utm_source=chatgpt.com
35. Sangadji. 2019. *Pengertian Anggaran*. <https://repository.unmuha.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1342/11.%20BAB%20II.pdf?sequence=12&isAllowed=y>
36. Sari, P., & Wulandari, D. 2021. *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau dari Efektivitas Pendapatan dan Efisiensi Belanja*. Jurnal Akuntabilitas Publik.
37. Sariono, E., & Marison S. 2024. *Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Depok*. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*.
38. Sedarmayanti. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Refika Aditama.
39. Sujarweni. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Baru Press.
40. Susanto, H. 2018. *Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram*. Distribusi : *Journal of Management and Business*.
41. Umar. 2016. *Analisis Realisasi Anggaran pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Marga Pemerintah Aceh Tahun 2014*. Jurnal Ilman.
42. Zainuddin, Dede. 2019. *Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Makassar*. (Skripsi). Prodi Akuntansi Universitas Bosowa.
